

Pengaruh Komitmen Manajemen, Lingkungan Birokrasi, dan Pengetahuan Peraturan terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Nindy Okniafita^{1*}, Dian Fitria Handayani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: nindyokniafita0610@gmail.com

Abstract

This study aims to determinate the effect of management commitment, bureaucratic environment, and the regulatory knowledge on budget absorption related to the procurement of goods/services in the government of Pariaman City. A sample of 88 respondents was determined by using a total sampling technique consisting of heads of fields or staff of the procurement department. Data were analyzed using multiple regression formulas with the help of the SPSS application. This study concludes that management commitment does not effect budget absorption related to goods/service procurement. Bureaucratic environment has a positive and significant effect on budget absorption related to the procurement of goods/services. Mean while, the regulatory knowledge has no effect on budget absorption related to the procurement of goods/services.

Keywords: *Management Commitment; Bureaucratic Environment; Knowledge of Regulations; Absorption of Budget Related to Procurement of Goods/Services.*

How to cite (APA 6th style)

Okniafita, N., & Handayani D.F. (2022). Pengaruh Komitmen Manajemen, Lingkungan Birokrasi dan Pengetahuan Peraturan terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (3), 482-495.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan dari pelaksanaan pembangunan nasional tersebut demi mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus pembangunan nasional diletakkan pada penyerapan anggaran yang menjadi hal penting untuk ditelusuri karena anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan berasal dari Keuangan Negara yaitu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia) yang telah direncanakan dan ditetapkan secara berkala setiap tahun.

Menurut Halim (2014), penyerapan anggaran merupakan sebuah kesuksesan dari sebuah estimasi yang akan diperoleh selama satu dekade tertentu dan dipandang pada suatu waktu tertentu (realisasi dari anggaran). Penyerapan anggaran berpengaruh cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Setiap instansi harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan

nasional. Kinerja sebuah instansi pemerintahan diukur dari tinggi rendahnya penyerapan anggaran.

Pemerintah setiap tahunnya melakukan penyerapan anggaran terhadap keuangan tahunan yang tertuang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 16 ayat 2, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas anggaran belanja, anggaran pendapatan, dan pembiayaan. Anggaran Belanja memuat proporsi belanja untuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan akun belanja barang/jasa dan belanja modal serta direncanakan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dibuat oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran setiap tahun.

Proporsi anggaran terkait pengadaan barang/jasa yang cukup besar diharapkan dapat diserap dengan baik oleh pemerintah daerah, sehingga tidak mengurangi manfaat dari belanjanya. Percepatan penyerapan anggaran memberikan dampak terkait dengan pengadaan barang/jasa yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan menikmati hasil pembangunan dari berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan, bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM), perumahan dan pemukiman, pariwisata dan sektor-sektor lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, penyerapan anggaran merupakan salah satu dari indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilaksanakan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran.

Komitmen manajemen menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Menurut Denika (2017), menjelaskan bahwa komitmen manajemen merupakan suatu sikap manajemen dimana manajemen memiliki keinginan untuk mengikatkan diri dengan organisasinya atau perusahaannya dan manajemen yakin dan nyaman akan organisasi tempat ia bekerja, dan dalam mewujudkan kesejahteraan organisasi manajemen ikut serta memberikan komitmennya berupa kreatifitas dan waktu seutuhnya. Komitmen manajemen disini merujuk ke komitmen normatif, dimana komitmen normatif merupakan perasaan karyawan tentang kewajiban yang harus diberikan kepada organisasi. Keinginan karyawan untuk tinggal dalam organisasi berdasarkan pada tugas, loyalitas, dan kewajiban moral. Tipe ini mungkin berasal dari kebudayaan individu atau etika kerja, karena mereka merasa bertanggung jawab untuk tetap tinggal dalam organisasi. Organisasi atau perusahaan dapat menerapkan komitmen terhadap manajemen dengan memberikan suatu pembelajaran, penghargaan, serta penekanan. Pencapaian target anggaran pada sektor pemerintah didukung oleh manajemen yang memiliki kemampuan serta berkomitmen (Halim dan Kusufi, 2012). Komitmen manajemen menggambarkan suatu hubungan antara atasan dengan bawahan dalam mencapai tujuan yang sama (Cooper, 2006), hal ini berarti komitmen manajemen dapat mempengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Lingkungan birokrasi juga sangat mempengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Lingkungan birokrasi memiliki arti yang sangat luas, pada hakekatnya lingkungan birokrasi merupakan wewenang yang dimiliki pihak internal dalam lingkungan pemerintahan. Lingkungan birokrasi menggambarkan keadaan atau kondisi yang ada didalam organisasi pemerintahan dengan seperangkat aturan dan prosedur yang ditata sebaik mungkin untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sedarmayanti, 2009). Keberhasilan sesuatu kegiatan dapat dinilai dari baik atau tidaknya keadaan lingkungan birokrasi. Dalam menjalankan struktur organisasi dengan sistem kerja yang stabil, dibutuhkan kejelasan dalam lingkungan birokrasi pada

umumnya, seperti suasana lingkungan kerja internal maupun lingkungan kerja eksternal. Pada hakikatnya lingkungan birokrasi merupakan struktur organisasi di ruang lingkup pemerintahan yang memiliki ruang lingkup tugas yang sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya (Bramastyasa, 2019). Kesuksesan suatu organisasi tidak akan terjadi jika kurangnya dorongan lingkungan birokrasi dalam kegiatan organisasi. Hal ini berarti, lingkungan birokrasi dapat memengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa.

Love *et al.* (2008) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyerapan anggaran, pengetahuan pegawai menjadi faktor yang penting. Pengetahuan peraturan adalah seluruh hal yang diketahui seseorang tentang aturan atau standar yang berisikan ketentuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman. Pengetahuan peraturan dapat dijadikan pedoman untuk mengatur kegiatan penyerapan anggaran dengan menggunakan sistem pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum. Kegiatan yang dilaksanakan tanpa mengikuti aturan yang berlaku akan menjadi masalah bagi SKPD (Bramastyasa, 2019). Penyerapan anggaran dapat dengan baik terlaksana apabila para aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyerapan anggaran akan optimal apabila pelaksanaannya memiliki pengetahuan yang luas akan peraturan. Pengetahuan peraturan memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Hal ini berarti, suatu perangkat pemerintah atau organisasi yang pelaksanaan penyerapan anggarannya maksimal dikarenakan pegawainya memiliki pengetahuan akan peraturan yang berlaku (Juliani, 2014).

Beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian Purtanto (2015) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah : proses pengadaan barang/jasa (studi atas persepsi pada pegawai bersertifikat pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Kota Tegal) menghasilkan 2 faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu komitmen manajemen dan perencanaan anggaran. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ledy (2016) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menghasilkan 5 faktor utama yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi. Dan juga pada penelitian Bramastyasa (2019) mengenai pengaruh perencanaan anggaran, sumber daya manusia, lingkungan birokrasi dan pengetahuan peraturan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hasil penelitiannya menunjukkan semua variabel independen yang digunakan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Juliani (2014) mengenai pengaruh faktor-faktor konstektual terhadap persepsian penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini meneliti pada seluruh SKPD yang ada di Kota Pariaman, sedangkan penelitian sebelumnya hanya meneliti di beberapa SKPD saja, tidak mencakup seluruh SKPD, dan penelitian ini menggunakan responden yaitu kepala bagian pengadaan atau pegawai di bidang pengadaan sesuai dengan saran yang diberikan oleh penelitian sebelumnya dikarenakan penelitian ini berhubungan dengan kebijakan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Adapun perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini diteliti di tempat dan waktu yang berbeda, yaitu di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pariaman dengan periode waktu 2021.

Alasan penelitian ini dilakukan karena adanya inkonsistensi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komitmen manajemen, lingkungan birokrasi, dan pengetahuan peraturan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dalam penelitian ini peneliti

memilih penyerapan anggaran karena penyerapan anggaran berpengaruh cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Fenomena rendahnya penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa, khususnya di Kota Pariaman menjadi daya tarik yang kuat untuk diteliti. Pengadaan barang dan jasa pada wilayah Pemerintah Kota Pariaman mengalami perbedaan persentase setiap tahunnya, yang mana realisasi anggaran setiap tahunnya tidak ada yang mencapai 100% dari target yang direncanakan. Dari capaian realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Kota Pariaman dari tahun 2017 sampai dengan 2019 realisasi anggarannya masih dibawah 90%. Persentase mengenai serapan anggaran ini tidak diatur dalam undang-undang, namun pada saat akhir tahun anggaran instansi pemerintah berusaha menyerap anggaran 100% agar tidak ditetapkan penyerapan anggarannya rendah (Ningtyas, 2020 dan Ani et. Al., 2020). Jika penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa tidak terealisasi secara sempurna, akan menciptakan suatu tempat untuk melakukan kecurangan dalam memanfaatkan anggaran yang tidak terealisasi itu. Sebagaimana pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar 70% kecurangan dalam bentuk korupsi terjadi pada pengadaan barang/jasa (Budi, 2012).

Penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa di Kota Pariaman kurang maksimal karena banyaknya permasalahan dalam tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Penyerapan anggaran setiap tahunnya dinilai lambat yang disebabkan oleh adanya kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu terdapatnya sisa tender, pekerjaan yang belum selesai atau putus kontrak akhir tahun anggaran, dimana ini merupakan bagian dari komitmen manajemen yang tidak terlaksana dengan dengan baik, yang seharusnya manajemen (pimpinan dan segenap jajarannya) memiliki perjanjian atau keterikatan untuk melakukan suatu pekerjaan hingga selesai dan dikerjakan dengan sepenuh hati. Permasalahan selanjutnya yaitu lambatnya penyampaian dokumen pengadaan kepada unit layanan pengadaan, merupakan bagian dari lingkungan birokrasi, yaitu lingkungan birokrasi berkaitan dengan budaya kerja, kebiasaan-kebiasaan pegawai, dan perilaku organisasi, selanjutnya tidak maksimalnya proses kontrak pengadaan barang/jasa karena lemahnya pemahaman dan pengetahuan beberapa lembaga/organisasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman (<https://pariamankota.go.id>, 2018). Apabila tidak segera dilakukan penanganan yang baik, maka hal tersebut akan berdampak terhadap tidak maksimalnya penyusunan anggaran pengadaan barang/jasa dan terlambat pada Rencana Umum Pengadaan (RUP), dan akan mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran di Kota Pariaman.

Alasan peneliti menggunakan faktor komitmen manajemen, lingkungan birokrasi, dan pengetahuan peraturan dalam penelitian ini dikarenakan ketiga faktor ini dapat menjadi faktor penting dalam peningkatan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Peneliti ingin memberikan kontribusi dengan melakukan pengujian kembali apakah pada variabel dan teori yang sama, tetapi pada waktu dan tempat yang berbeda akan memberikan hasil yang sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa, peneliti berharap nantinya dengan penelitian ini dapat menyelesaikan permasalahan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa khususnya dimana peneliti meneliti yaitu di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Institusional (*Institutional Theory*)

Teori Institusional (*Institutional Theory*) atau teori kelembagaan yaitu terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institutional yang menyebabkan terjadinya institutionalisasi. Teori ini menggambarkan hubungan antara organisasi dengan

lingkungannya, tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut (Meyer dan Rowan, 1977). Menurut North (1991), teori institusional adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan tersebut terdiri dari aturan formal dan aturan informal. Teori Institusional menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap organisasinya. Implikasi *Institusional Theory* dalam penelitian ini adalah dalam mencapai penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa yang optimal, harus terdapat kesesuaian antara lingkungan yang ada disuatu organisasi dengan tujuan yang akan dicapai yaitu serapan anggaran yang optimal. Kesuksesan suatu organisasi tidak akan terjadi jika kurangnya dorongan lingkungan birokrasi dalam kegiatan organisasi, komitmen terhadap organisasi, dan pengetahuan terhadap aturan yang berlaku terkait pengadaan barang/jasa pada suatu pemerintahan.

Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Halim (2014), penyerapan anggaran adalah sebuah kesuksesan dari sebuah estimasi yang akan diperoleh selama satu dekade tertentu dan dipandang pada suatu waktu tertentu (realisasi dari anggaran). Penyerapan anggaran bisa didefinisikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sehubungan yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada saat tertentu, dapat dilihat disini adalah organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan. Pencapaian target anggaran merupakan penilaian bagi kinerja manajer publik, seberapa besar pencapaian yang dihasilkan. Penghitungan penilaian kerja dilakukan dengan mendalami tentang simpangan kinerja aktual dengan yang akan dianggarkan (Mardiasmo, 2009). Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat (1), pengertian pengadaan barang/jasa adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya dikatakan Pengadaan Barang/Jasa merupakan sebuah proses dalam menghasilkan Barang/Jasa oleh Kementrian/Badan yang terarah sehingga barang dan jasa tersebut bisa dimanfaatkan.

Komitmen Manajemen

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.25/KEP/M.PAN/2002 menyatakan pengertian komitmen manajemen adalah keteguhan hati, tekad yang mantap, dan janji untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang diyakini. Komitmen manajemen mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengidentifikasi tujuannya terhadap organisasi (Kreitner, 2008). Komitmen manajemen adalah suatu sikap manajemen dimana manajemen memiliki keinginan untuk mengikat diri dengan organisasinya atau perusahaannya dan manajemen yakin dan nyaman akan organisasi tempat ia bekerja. Manajemen yang mempunyai rasa berkomitmen terhadap organisasi maka biasanya akan bertahan lama dilingkungan organisasi, hal ini dikarenakan manajemen merasa terikat dengan organisasinya.

Lingkungan Birokrasi

Dalam sebuah organisasi pada birokrasi akan selalu berdampingan dengan faktor lingkungan. Keberadaan birokrasi dalam suatu organisasi tidak dapat dipungkiri dengan lingkungannya. Lingkungan disini adalah lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Pada lingkungan internal organisasi memberikan dampak yang terjadi didalam organisasi tersebut seperti hubungan antar karyawan, sosialisasi, pengendalian internal organisasi, dan lain-lain. Kondisi internal pegawai ini senantiasa berganti dan berkembang, sehingga mewujudkan sebuah pemahaman yang sesuai, agar permasalahan-permasalahan yang timbul dapat dipecahkan. Berbeda dengan lingkungan internal, lingkungan eksternal organisasi lebih fokus terhadap kondisi yang terjadi diluar organisasi seperti pihak luar yang bekerjasama, kebijakan Negara, pembaruan teknologi, serta masyarakat umum (Matheus dan Sulistiyani, 2011).

Pengetahuan Peraturan

Pengetahuan adalah hasil pengetahuan seseorang terhadap suatu objek lewat pancaindra yang dimilikinya. Menurut Bayu arsadinata (2015), peraturan adalah perangkat yang berisikan ketentuan untuk dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan bersama yang telah disepakati dalam suatu organisasi yang bersifat mengikat, pembatasan dan pengaturan harus ditaati serta dilaksanakan agar terhindar dari sanksi untuk terciptanya keadaan yang teratur. Pengetahuan peraturan adalah seluruh hal yang diketahui seseorang tentang aturan atau standar yang berisikan ketentuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman. Pengetahuan akan peraturan dapat diperoleh melalui seminar tentang peraturan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga hukum.

Pengaruh Komitmen Manajemen Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Dalam perspektif teori institusional, komitmen manajemen terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa dibutuhkan karena mempengaruhi maksimal atau tidaknya serapan anggaran. Hal ini dapat dilihat bagaimana Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memberikan dukungan secara nyata terhadap kinerja bawahannya untuk mencapai penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Evaluasi target serapan anggaran mendukung pelatihan terkait pengadaan dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi, merupakan bukti adanya komitmen manajemen yang baik dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Hasil penelitian Purtanto (2015), dan Meyulinda (2018) menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Lemahnya komitmen manajemen merupakan salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran (Arif, 2013). Sementara itu, Juliani (2014) menemukan dalam penelitiannya bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Berarti semakin tinggi komitmen manajemen maka penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa akan maksimal. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H1: Komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Pengaruh Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Dalam sebuah organisasi pada birokrasi akan selalu berdampingan dengan faktor lingkungan. Hal ini sesuai dengan *Institutional Theory* yang menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses. Lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan kegiatan operasional menjadi lancar. Namun jika lingkungan birokrasi tidak mendukung kegiatan organisasi maka akan menghambat kinerja organisasi.

Hasil penelitian Ledy (2016) mendukung penelitian Juliani (2014) yang menunjukkan lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian Denita (2017), Meyulinda (2018), dan Bramastyasa (2019) menunjukkan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan semakin baik lingkungan dalam birokrasi akan menghasilkan ketepatan dalam penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H2: Lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Pengetahuan Peraturan harus dimiliki oleh pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Jika para pegawai mengetahui berbagai macam informasi dari peraturan yang ada terkait pengadaan barang/jasa, maka akan menghasilkan perubahan atau peningkatan peraturan. Dalam perspektif teori institusional, segala perilaku dan tindakan yang diambil oleh pegawai publik terkait pengadaan barang/jasa selalu dibatasi oleh institusional (Juliani, 2014). Para pegawai yang dibatasi oleh keterbatasan dalam memperoleh suatu informasi mengenai peraturan, akan berdampak pada proses bagaimana cara mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang baru dalam menyerap anggaran secara sempurna.

Hasil penelitian Bramastyasa (2019) menunjukkan pengetahuan peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Selanjutnya, Juliani (2014) menemukan hasil bahwa pengetahuan peraturan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Serta, Dewa (2017) menunjukkan pengetahuan peraturan mempengaruhi penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat pengetahuan peraturan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka semakin baik penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H3: Pengetahuan peraturan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah dua puluh dua (22) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Pariaman. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan alasan subjek dalam penelitian ini kurang dari 100 subjek. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 88 sampel yang terdiri dari pejabat struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah Kota Pariaman, yang terdiri dari kepala dinas/badan/kantor, sekretaris/serendaharta sekretaris dan kepala bidang/bagian/subdinas.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari sumber asli (Sugiyono, 2017). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden yang menjadi sampel penelitian ini.

Pengolahan data adalah suatu langkah-langkah untuk mendapatkan data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara atau rumus tertentu. Pengolahan data memiliki tujuan untuk mengganti data kotor hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus dan dapat dimengerti sehingga mendapatkan pemahaman lebih lanjut (Sudjana, 2001). Peneliti menggunakan pengolahan data komputerisasi program SPSS pada penelitian ini. Karena program ini mempunyai kemampuan analisis statistik yang cukup bagus serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak mudah ditemui, sehingga cara pengoperasiannya mudah dipelajari dan dipahami (Sugianto, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komitmen Manajemen	55	18	25	21,22	1,781
Lingkungan Birokrasi	55	26	38	32,15	2,352
Pengetahuan Peraturan	55	17	27	22,20	2,460
Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa	55	26	39	29,98	2,732
Valid N (listwise)	55				

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai maksimum dan minimum variabel independen pertama yaitu komitmen manajemen sebesar 25 dan 18. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,22 dengan standar deviasi sebesar 1,781. Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah lingkungan birokrasi memiliki nilai maksimum dan minimum 38 dan 26, nilai rata-rata sebesar 32,15 dengan standar deviasi 2,352. Variabel independen ketiga dalam penelitian ini adalah pengetahuan peraturan memiliki nilai maksimum dan minimum 27 dan 17, nilai rata-rata sebesar 22,20 dengan standar deviasi 2,460. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 39 dan 26, nilai rata-rata sebesar 29,98 dengan standar deviasi 2,732. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini semakin akurat dengan mean, dikarenakan apabila standar deviasi suatu variabel semakin rendah, maka data dalam variabel tersebut semakin mengumpul pada nilai *mean*-nya.

UJI ASUMSI KLASIK
Uji Normalitas

Tabel 2
Uji Normalitas

	Unstandardized Residual	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.46799652
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.074
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test*. Hasil uji normalitas pada penelitian ini memiliki probabilitas tingkat signifikansi 0,200 diatas nilai signifikansi yaitu 0,05, ini berarti data penelitian ini normal, yang berarti data bisa digunakan dan dilanjutkan pada penelitian ini.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Komitmen Manajemen	,748	1,337
Lingkungan Birokrasi	,792	1,263
Pengetahuan Peraturan	,871	1,148

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satupun variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada variabel bebas dalam penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4
Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized		Standardized		t	Sig.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-2.827	3.160			-.895	.375
Komitmen Manajemen	.087	.130	.105		.667	.508
Lingkungan Birokrasi	.017	.096	.026		.173	.864
Pengetahuan Peraturan	.108	.087	.180		1.240	.221

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021

Dari Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi dari variabel independen yaitu komitmen manajemen 0,50, lingkungan birokrasi 0,86, dan pengetahuan peraturan 0,22 memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

PENGUJIAN HIPOTESIS

Uji Statistik F

Tabel 5
Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	74,067	3	24,689	3,828	,015 ^b
Residual	328,914	51	6,449		
Total	402,982	54			

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi hasil uji F adalah sebesar 0,015, berarti $0,015 < 0,05$ menunjukkan bahwa secara bersama-sama pengaruh komitmen manajemen (X1), lingkungan birokrasi (X2), dan pengetahuan peraturan (X3) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa (Y).

Uji Statistik T

Tabel 6
Uji Statistik T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15,594	5,440		2,867	,006
Komitmen Manajemen	-,140	,224	-,092	-,626	,534
Lingkungan Birokrasi	,534	,165	,459	3,232	,002
Pengetahuan Peraturan	,010	,151	,009	,064	,949

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada Tabel 6, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Data dari tabel diatas, diketahui nilai signifikan $0,534 > 0,05$ dengan Thitung (negatif) $-0,626 < T_{tabel} 2,007$ yang menunjukkan bahwa komitmen manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak.
2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Data dari tabel diatas, diketahui nilai signifikan $0,002 < 0,05$ dengan Thitung $3,232 > T_{tabel} 2,007$ yang menunjukkan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima.
3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah pengetahuan peraturan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Data dari tabel diatas, diketahui nilai signifikan $0,949 > 0,05$ dengan Thitung $0,064 < T_{tabel} 2,007$ menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Tabel 7
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.429 ^a	.184	.136	2.540

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-square* (R^2) sebesar 0,136 atau 13,6%, artinya variabel dependen penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa dapat dijelaskan secara signifikan oleh variabel independen komitmen manajemen, lingkungan birokrasi dan pengetahuan peraturan sebesar 13,6%. Sisanya sebesar 86,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hasil uji statistik t untuk variabel komitmen manajemen memiliki nilai t hitung (negatif) -0,626 dengan nilai signifikansi $0,534 > 0,05$, nilai koefisien regresi komitmen manajemen adalah (negatif) -0,140. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dengan demikian hipotesis 1 ditolak.

Pengaruh negatif komitmen manajemen terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa mengidentifikasi bahwa tingginya komitmen manajemen tidak menjadi pedoman dalam penyerapan anggaran yang dilakukan untuk pengadaan barang/jasa. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dukungan dan tanggung jawab secara merata kepada para pegawai sehingga berdampak negatif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Komitmen manajemen akan memberikan dampak positif apabila adanya dukungan secara merata kepada para pegawai, yang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada para pegawai. Apabila rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan telah tumbuh, maka penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa dapat dimaksimalkan.

Berdasarkan teori institusional, institusional sebagai proses dalam organisasi untuk menetapkan suatu karakter yang ditentukan oleh komitmen organisasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip (Ridha dan Basuki, 2012). Hal ini dapat dilihat bagaimana SKPD memberikan dukungan secara nyata terhadap kinerja pegawainya berupa waktu yang diperlukan, sumber daya, dan pendekatan positif terhadap proyek yang sedang dikerjakan untuk mencapai penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Berdasarkan hal tersebut tidak berpengaruhnya komitmen manajemen disebabkan karena tidak adanya dukungan dari atasan terhadap kinerja pegawainya dalam mencapai penyerapan anggaran yang maksimal, hal ini berdampak pada proses bagaimana pendekatan positif terhadap proyek yang sedang dikerjakan dalam mencapai penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa secara sempurna.

Pengaruh Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hasil uji statistik t untuk variabel lingkungan birokrasi memiliki nilai t hitung 3,232 dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$, nilai koefisien regresi lingkungan birokrasi adalah 0,534. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dengan demikian hipotesis 2 diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya lingkungan birokrasi yang baik dapat mendorong peningkatan serapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Pariaman, serapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa dapat terealisasi apabila dalam suatu organisasi memiliki lingkungan birokrasi yang baik. Dalam hal ini lingkungan birokrasi yang baik dapat mencerminkan serapan anggaran yang sempurna terkait pengadaan barang/jasa.

Teori institusional juga mendukung penelitian ini, dalam perspektif teori institusional, organisasi sektor publik dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya seharusnya berperan sebagai unit analisis yang meyakinkan publik atas segala tindakan yang dilakukan oleh pegawai publik dalam memaksimalkan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini dijelaskan bahwa unit analisis dalam teori institusional adalah *organization field* yaitu sekelompok organisasi yang secara keseluruhan membentuk suatu kehidupan

institusional seperti pemasok utama, pelanggan, regulator atau pesaing (Darono, 2013). Jika suatu kehidupan institusional dalam organisasi sektor publik, baik sebagai pemasok utama, pelanggan, regulator atau pesaing berjalan seiring dengan aspek-aspek sosial dan hukum, tekanan maupun kepentingan konstituen tidak akan mempengaruhi pegawai publik dalam memaksimalkan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Hasil penelitian Ledy (2016) mendukung penelitian Juliani (2014) yang menunjukkan lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian Denita (2017), Meyulinda (2018), dan Bramastyasa (2019) menunjukkan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan semakin baik lingkungan dalam birokrasi akan menghasilkan ketepatan dalam penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu pengetahuan peraturan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hasil uji statistik t untuk variabel pengetahuan peraturan memiliki nilai t hitung 0,064 dengan nilai signifikansi $0,949 > 0,05$. Nilai koefisien regresi pengetahuan peraturan adalah 0,010. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dengan demikian hipotesis 3 ditolak.

Pengaruh negatif pengetahuan peraturan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa mengidentifikasi bahwa tingginya pengetahuan peraturan tidak menjadi pedoman dalam penyerapan anggaran yang dilakukan untuk pengadaan barang/jasa. Hal ini disebabkan karena pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman yang memahami pengetahuan akan peraturan tidak dapat memberikan praktik terbaik dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga berdampak negatif terhadap penyerapan anggaran. Pengetahuan peraturan akan memberikan dampak positif jika saja karyawan mampu mengimplementasikannya ke dalam praktek kerja sehingga serapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa dapat dilakukan semaksimal mungkin.

Menurut perspektif teori institusional, segala perilaku dan tindakan yang diambil oleh pegawai publik terkait pengadaan barang/jasa selalu dibatasi oleh organisasi. Organisasi pemerintahan memberlakukan aturan serta norma-norma dalam bentuk program untuk mencapai tujuan pengoperasiannya. Peraturan diciptakan agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan organisasi. Berdasarkan hal tersebut tidak berpengaruhnya pengetahuan peraturan disebabkan karena para pegawai dibatasi oleh keterbatasan dalam memperoleh suatu informasi mengenai peraturan pengadaan barang/jasa, hal ini berdampak pada proses bagaimana cara mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang baru dalam menyerap anggaran secara sempurna.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tidak terdapat pengaruh komitmen manajemen terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Tidak adanya pengaruh tersebut dikarenakan tidak adanya dukungan dari atasan terhadap kinerja pegawainya dalam mencapai penyerapan anggaran yang maksimal.
2. Terdapat pengaruh positif signifikan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dimana semakin baik lingkungan birokrasi pada suatu

organisasi, maka serapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa yang dihasilkan dapat terealisasi semaksimal mungkin.

3. Tidak terdapat pengaruh pengetahuan peraturan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Tidak adanya pengaruh tersebut dikarenakan pegawai dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman yang memahami pengetahuan akan peraturan tidak dapat memberikan praktik terbaik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga akan berdampak negatif pada penyerapan anggaran.

Keterbatasan

Dalam penelitian yang dilakukan masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data pada penelitian ini dijangkau menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan, dan peneliti tidak mampu mengontrol secara ketat seluruh pernyataan responden yang mengisi kuesioner penelitian untuk mengumpulkan data penelitian terhadap tingkat kejujuran responden. Sehingga terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Walaupun dalam pengisian angket sudah diupayakan secara teliti dan hati-hati, tentunya hal tersebut juga tidak lepas dari kemungkinan adanya responden yang mengisi kuesioner dengan tidak serius dan asal-asalan.
3. Peneliti hanya sedikit mendapatkan jurnal internasional dikarenakan jurnal internasional tentang penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa masih sedikit yang meneliti.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pariaman, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan dengan menambahkan wilayah dalam bentuk Provinsi.
2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada kepala atau pegawai dibidang pengadaan, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan cara-cara atau metodologi yang lebih baik dalam menentukan responden yang lebih akurat.
3. Penelitian ini hanya sedikit mendapatkan jurnal internasional, sehingga hanya terdapat sedikit pengaruh R-square nya, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari lebih banyak lagi jurnal internasional sebagai acuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, D. A., Herawati, N. T., & Wahyuni, A. M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Peraturan dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penyerapan Anggaran dengan Kepribadian Conscientiousness Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA* .
- Arthana, I. M., Ni Putu, S. M., & Made, G. W. (2016). Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Pegawai pada Kinerja Penyerapan Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Lingkup Pembayaran KPPN Denpasar). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* , 1143-1170.
- BPKP. (2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Yogyakarta Review.
- Bramastyasa, G. P. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Lingkungan Birokrasi dan Pengetahuan Peraturan terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. *UNISSULA Institutional Repository* .

- Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., & Tomasowa, T. E. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Padang*
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliani, D., & Sholihin, M. (2014). Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual terhadap Persepsian Anggaran terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* , 177-199.
- Kuswoyo, I. D. (2011). Analisis atas Faktor-Faktor yang menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran. *Tesis* .
- LKPP. (2011). Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . *Jurnal Pengadaan* .
- Mastuti, D. L., Suharno, & Kristiano, D. (2017). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran, Lingkungan Birokrasi, Komitmen Manajemen, Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*.
- Negara, K. P., Handajani, Lilik & Effendy, L. (2018). Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah . *Jurnal Akuntansi dan Investasi*.
- Ozal, D. (2012, Agustus 30). *Melalui TEPPA, Presiden Ingin Tahu Penyerapan Anggran* . Retrieved Februari 14, 2020, from Kompas.com: www.google.com/amp/s/amp.kompas.com
- Purtanto. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Pengadaan Barang/Jasa.
- Putri, C. T., & Fachruzzaman. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja di Pemeintah Provinsi Bengkulu. *Skripsi* .
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara . Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Republik Indonesia.
- Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bolaang Mangondo Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing "Goodwill"* .
- Sedarmayanti. (2009). *Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan Serta Meningkatkan Kineja Untuk Meraih Keberhasilan* . Bandung: PT. Refika Adhitama.
- Setyapurnama, Y. S., & A M, V. N. (2006). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Peringkat Obligasi dan Yield Obligasi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Swamandiri. (2011). *Problematika Penyerapan Anggaran di Daerah* . Retrieved Februari 2, 2020, from Swamandiri